

## **BAB 2**

### **PERKEMBANGAN MEDIA DAN DINAMIKA INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Rusia dan Ukraina memiliki hubungan geopolitik yang saling bersinggungan. Pasca dilakukannya aneksasi Krimea, hubungan antara Rusia dan Ukraina kian memanas. Dalam konflik invasi Rusia tahun 2022, perang antara Rusia dan Ukraina tidak hanya mengandalkan operasi militer, namun juga dunia siber. Bab ini berisikan latar belakang terjadinya invasi Rusia tahun 2022, sejarah dan perkembangan media dalam Hubungan Internasional, serta kronologi perang informasi yang terjadi antara kedua negara dalam konflik invasi Rusia tahun 2022.

#### **2.1. Latar Belakang Invasi Rusia terhadap Ukraina Tahun 2022**

Tepat pada tanggal 24 Februari, Rusia membuktikan ancaman operasi militer khusus yang sempat disampaikan oleh Vladimir Putin. Rusia dan Ukraina sejatinya pernah menjadi ‘sahabat’ baik di bawah naungan Uni Soviet. Meski sempat bersitegang pasca tuduhan adanya campur tangan Rusia terhadap negara pecahan Uni Soviet melalui pembentukan *Commonwealth of Independent States* (CIS)<sup>1</sup>, perselisihan ini berakhir pada Mei 1997 dan bertahan hingga satu dekade lamanya (CNN Indonesia, 2022a).

Tepat pada tahun 2014, perselisihan antara Rusia dan Ukraina kembali terjadi pasca dilakukannya serangkaian aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut Rusia agar berhenti mencampuri berbagai konflik dan

---

<sup>1</sup> *Commonwealth of Independent States* (CIS) merupakan organisasi regional berisi dua belas negara pecahan Republik Uni Soviet yang dibentuk pada 8 Desember 1991. Melalui Perjanjian Belovezh, kesepakatan berdirinya CIS ini disebutkan sebagai tanda keruntuhan Uni Soviet.

persoalan yang terjadi di Ukraina. Kedekatan Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina kala itu dengan Rusia menimbulkan berbagai spekulasi akan mengembalikan Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Tuntutan dari masyarakat ini kemudian berakhir dengan lengesernya Yanukovych dan dikenal sebagai Revolusi Ukraina (BBC Indonesia, 2014).

Di tengah kekosongan pemerintahan Ukraina, Vladimir Putin kerap menunjukkan dukungan terhadap kelompok separatisme di wilayah Ukraina Timur, yakni Kota Donetsk dan Luhansk. Pada tahun yang sama, Putin juga sempat melakukan manuver untuk merebut Krimea. Konflik antara keduanya kian meradang pasca Petro Poroshenko, Presiden Ukraina mencapai perjanjian damai Minsk pada tahun 2015. Konflik antara keduanya kian diperparah dengan fakta bahwa Poroshenko mulai melakukan pendekatan dengan Uni Eropa dan NATO. Putin menyebutkan bahwa kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO berpotensi menjadi ancaman bagi Rusia di masa depan. Hal ini dikarenakan NATO dimungkinkan akan melakukan pembangunan pangkalan militer pada wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina. Perselisihan ini kemudian mengarahkan pada munculnya desas-desus invasi oleh Rusia pada November 2021, tepatnya pada masa kepemimpinan Volodymyr Zelenskyy yang kala itu meneruskan lobi kepada pihak Uni Eropa. Citra satelit juga menunjukkan konsentrasi pasukan militer Rusia yang mencapai 100.000 tentara beserta alutsista lengkapnya di dekat perbatasan Ukraina. Pada Januari 2022, Rusia juga turut melakukan latihan militer skala besar yang menuai ancaman dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat (CNN Indonesia, 2022a).

Putin sempat menyangkal akan melakukan invasi terhadap Ukraina. Ia juga menyebutkan permohonan kepada NATO untuk menghentikan berbagai aktivitas di Eropa Timur serta tidak menerima negara pecahan Uni Soviet sebagai anggota. Melalui esai bertajuk "*On the Historical Unity of Russians and Ukrainians*" yang dipublikasikan pada 12 Juli 2021, Putin menjelaskan dasar sejarah yang menjadikan Rusia dan Ukraina sebagai 'satu bangsa'. Dalam esai yang sama, Putin menegaskan bagaimana 'campur tangan' Barat merusak identitas asli Ukraina, sekaligus menyatakan kedaulatan Republik Donetsk dan Luhansk. Putin menyebutkan bahwa keruntuhan Uni Soviet di masa lalu menjadi salah satu alasan Rusia merasa 'dirampok' (Dickinson, 2021).

Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat dibagi menjadi tiga fase utama. Pada fase pertama, konflik dimulai ketika Rusia berupaya menaklukkan Ukraina dengan melengserkan pemerintahannya. Tepat pada 24 Februari 2022, Putin mengumumkan akan dilakukannya operasi militer khusus pada wilayah Ukraina. Berselang beberapa menit setelah pengumuman tersebut, pasukan Rusia mulai menyerang Kyiv, ibukota Ukraina dan Kharkiv, salah satu kota terbesar di negara tersebut (BBC, 2023). Serangan ini ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Volodymyr Zelenskyy (Bigg, 2023). Putin menyebutkan bahwa aksi penyerangan tersebut tidak dilakukan untuk menduduki wilayah Ukraina, namun sebagai suatu tindak perlindungan bagi masyarakat Donetsk dan Luhansk agar terbebas dari Ukraina. Ia juga mengklaim bahwa masyarakat di kedua kota turut mengalami genosida sebagaimana perlakuan Nazi di masa lalu (CNN Indonesia, 2022a). Pidato tersebut kemudian menuai respon berupa pengumuman darurat militer oleh

Volodymyr Zelenskyy selaku Presiden Ukraina. Pada 26 Februari, Zelenskyy menolak tawaran untuk mengungsi dari Amerika Serikat. Ia dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya yang dibutuhkan saat ini ialah amunisi, bukan tumpangan. Di saat yang sama, serangan dari Rusia kemudian berhenti pasca Ukraina berupaya menargetkan kendaraan pasokan dengan rudal Javelin. Uni Eropa kemudian turut mengambil sikap melalui pembekuan simpanan bank sentral Rusia, sekaligus melarang peluncuran pesawat Rusia dari wilayah Uni Eropa. Tepat pada tanggal 28 Februari, Ukraina kemudian mendaftar secara resmi untuk menjadi bagian dari Uni Eropa (Psaropoulos, 2022).

Pada bulan Maret, Rusia kembali melancarkan serangan dari arah selatan untuk mendapatkan wilayah Kherson demi mengamankan wilayah pantai. Pengerahan pasukan militer ini dilakukan sepanjang 65 km menuju Kyiv, ibukota Ukraina. Kala itu, satu juta pengungsi Ukraina diperkirakan telah berhasil meninggalkan negara. Pada tanggal 4 Maret, Rusia kembali melakukan serangan melalui aksi penembakan nuklir Zaporizhzhia di Eropa. *European Commission* kemudian meluncurkan *REPowerEU*, sebuah rancangan yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan gas alam sebagai respon atas invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina (European Commission, 2022). Uni Eropa juga turut mengeluarkan Deklarasi Versailles yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan dan basis ekonomi sekaligus meminimalisir tingkat ketergantungan energi. Di sisi lain, Kongres Amerika Serikat juga turut memberikan bantuan untuk pengungsi dan militer garis depan Ukraina sejumlah \$13,6 miliar (Aljazeera, 2022a). Pada 11 Maret, pasukan Rusia mulai memasuki wilayah pinggiran barat laut Kyiv. Meski

jumlah pasukannya mulai berkurang secara signifikan, pasukan Rusia berupaya memperluas sasaran ke arah barat melalui aksi penembakan 30 rudal ke pangkalan pelatihan militer di Yavoriv. Tanggal 16 Maret, Rusia kembali melakukan pengeboman teater di Mariupol dan menewaskan sedikitnya 300 warga sipil yang tengah berlindung. Pada 23 Maret 2022, NATO menyatakan bahwa Rusia mengalami kehilangan mencapai 7.000 hingga 15.000 tentara dalam kurun waktu satu bulan (Psaropoulos, 2022).

Memasuki fase berikutnya, konflik antara Rusia dan Ukraina kemudian mulai berfokus pada upaya konsolidasi Rusia atas kendalanya pada provinsi Luhansk dan Donetsk. Pasca Zelenskyy menyatakan kesediannya untuk berkompromi pada 27 Maret lalu, kedua negosiator Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul pada 29 Maret dalam rangka pengajuan proposal netralitas (BBC, 2022b). Pada tanggal 2 April, lusinan mayat warga sipil ditemukan di jalanan. Hal ini menimbulkan reaksi dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Putin sudah seharusnya diadili atas dugaan pembunuhan terhadap warga sipil Bucha terkait kasus kejahatan perang (Cathey dan Nagle, 2022). Pada 5 April 2022, jumlah pengungsi Ukraina mencapai kisaran 7,1 juta. Menyusul berbagai aksi penyerangan lainnya, Uni Eropa memberikan ultimatum berupa larangan impor baru bara, kayu, semen, makanan laut, bahan bakar, hingga teknologi dan perangkat lunak milik Rusia pada tanggal 8 April 2022. Di hari yang sama, Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa juga menyerahkan kuesioner kepada Zelenskyy untuk memulai proses aplikasi keanggotaan Ukraina sebagai bagian dari Uni Eropa (Psaropoulos, 2022).

Berbagai aksi penyerangan baik dari Rusia maupun Ukraina terus berlanjut. Pada tanggal 18 April, pasukan Rusia kembali melancarkan serangan berskala besar untuk mengambil alih oblast Luhansk dan Donetsk (DW, 2022c). Pasca pengumuman kemenangan Putin atas Mariupol pada 21 April lalu, Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat berupaya mempercepat pengajuan pengiriman senjata dan pengeluaran sebesar \$33 miliar untuk Ukraina (Sullivan, *et. al.*, 2022). Pada Mei 2022, Ukraina akhirnya memberikan serangan balasan dan berhasil memukul mundur pasukan Rusia. Keberhasilan Ukraina pada pertempuran di Kyiv ini menjadi kemenangan pertama Ukraina selama invasi melawan Rusia (Psaropoulos, 2022).

Pada 5 Mei 2022, Valerii Zaluzhnyi selaku panglima tertinggi Ukraina menyatakan bahwa pasukan Ukraina tengah melakukan transisi untuk menjalankan operasi ofensif. Pada 11 Mei 2022, Ukraina untuk pertama kalinya memotong alir gas dari Rusia yang melewati wilayahnya (Sorongan, 2022). Pada tanggal 16 Mei, pasukan Ukraina kembali maju mendekati perbatasan Rusia yang disusul dengan pengumuman berakhirnya perlawanan terakhir di pabrik baja Azovstal, Mariupol tepat sehari setelahnya (CNBC, 2022c). Pada tanggal 19 Mei, Kongres Amerika Serikat menyetujui pemberian paket bantuan sebesar \$40 miliar. Dua hari setelahnya, pertempuran kembali terjadi di Kota Severodonetsk (BBC, 2022a). Rusia kemudian mengumumkan kendali penuh atas Mariupol dan berfokus membangun garis pertahanan sekunder pada wilayah Kherson dan Zaporizhia sebagai bentuk antisipasi atas serangan balik dari Ukraina. Serangan tiga arah yang dilancarkan Rusia pada tanggal 27 Mei kemudian direspon melalui

serangan balasan Ukraina di Kherson pada tanggal 28 Mei. Serangan balasan ini menimbulkan kerugian besar dan berakhir membawa kembali Rusia untuk memperketat posisi pertahanannya. Pada tanggal 30 Mei, Biden kemudian memutuskan untuk mengirim GMLRS dan M142 *High Mobility Artillery Rocket Systems* (HIMARS) dengan roket berjangkauan 80 km (49,7 mil) untuk menghasilkan serangan artileri yang lebih presisi (Bigg, 2023). Pada tanggal 31 Mei, Pasukan Rusia berhasil menduduki pusat Severdonetsk. Ukraina kemudian melakukan serangan balasan dan berhadil mendorong mundur pasukan Rusia ke timur sungai Inhulets. Pada tanggal 2 Juni, serangan balasan Ukraina ini disebutkan berhasil membebaskan 20 desa (Psaropoulos, 2022).

Menyusul pengiriman senjata dari Amerika Serikat, Inggris turut melakukan pengiriman M270 *Multiple Launch Rocket System* (M270 MLRS). Pemerintah Inggris kemudian turut menyebutkan bahwa pasukan militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan peluncur tersebut (Durbin, 2022). Pada tanggal 22 Juni 2022, Ukraina disebutkan telah berhasil mengambil alih kembali 1.026 pemukiman. Dua hari setelahnya, Ukraina bersama Moldova mendapat undangan resmi untuk menjadi kandidat keanggotaan Uni Eropa. Tepat 100 hari perang, banyak masyarakat kembali mengungsi. Berbagai situs sejarah dan budaya milik Ukraina juga mulai hancur selama terjadinya serangan. Pada periode waktu ini, Rusia mulai mengalami banyak kerugian secara finansial akibat berbagai sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara internasional. Sayangnya, pemberian sanksi ini tidak hanya membayangi Rusia secara domestik, namun juga berdampak pada masyarakat internasional secara keseluruhan (Askew, 2023).

Pada tanggal 30 Juni, pasukan Rusia mundur dari Pulau Ular setelah mendapat hantaman dari rudal Ukraina. Tiga hari setelahnya, Rusia mengklaim telah berhasil merebut Lysychansk dan menjadi penutup dari fase kedua dalam konflik invasi kedua negara (Psaropoulos, 2022).

Fase ketiga dalam konflik ini terjadi ketika Rusia berupaya memperluas tujuannya untuk memasuki Kherson dan Zaporizhia. Fase ini dimulai pada tanggal 4 Juli 2022, dimana 40 negara turut berpartisipasi dalam *International Conference on the Restoration of Ukraine* yang diselenggarakan di Lugano, Swiss. Dilansir melalui hasil wawancara dalam surat kabar RIA Novosti milik Rusia, Sergey Lavrov selaku Menteri Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa aksi Rusia saat ini sudah jauh menyimpang dari tujuan resmi dilakukannya invasi. Jika awalnya fokus invasi hanya untuk menduduki dua wilayah timur—Luhansk dan Donetsk, Rusia kini berpikir bahwa pengambil alih Zaporizhia dan Kherson merupakan sebuah langkah penting. Pada tanggal 22 Juli, Rusia dan Ukraina melakukan penandatanganan kesepakatan PBB. Selama terjadinya invasi, hampir 20 juta ton gandum Ukraina diblokir oleh Rusia. Di sisi lain, Ukraina juga kerap melakukan pemasangan ranjau darat sebagai strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Rusia. Blokade yang sempat memicu krisis global ini berakhir membuat lonjakan harga pangan dan meningkatkan angka kelaparan. Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan di Turki tersebut dinilai sebagai alternatif yang tepat untuk membuka pengiriman gandum dari laut hitam (DW, 2022a). Pada tanggal 26 Juli, Perusahaan Gazprom asal Rusia kembali mengurangi aliran gas ke Jerman dari pipa Nord Stream 1 dan menyisakan 20



persen dari kapasitas normal (DW, 2022b). Pengurangan aliran gas ini kemudian direspon oleh Uni Eropa melalui pengurangan penggunaan gas alam mencapai 15 persen hingga Maret 2023. Pada tanggal 27 Juli, Ukraina menggunakan HIMARS untuk merusak kendaraan Antonovka dan jembatan sebagai upaya membatasi transportasi dan pasukan Rusia di Kherson. Melalui laporan di tanggal 29 Juli, kisaran 50 tawanan perang Ukraina berakhir tewas pasca ledakan di Olenivka, Donetsk. Dua hari setelahnya, pesawat tanpa awak milik Ukraina dilaporkan terbang ke markas armada Laut Hitam Rusia dan berhasil melukai lima orang (Psaropoulos, 2022).

Menyusul kesepakatan yang dilakukan 22 Juli lalu, kapal pertama dengan muatan biji-bijian asal Ukraina mulai meninggalkan pelabuhan. Pada tanggal 6 Agustus, Ukraina kembali melancarkan serangan. Pada tanggal 7 Agustus kembali dilaporkan bahwa Ukraina berhasil menghancurkan 24 peluncur roket ganda milik Rusia, tank T-62, serta lima kendaraan berlapis baja dan gudang amunisi. Dua hari kemudian, sekitar sembilan pesawat tempur Rusia dihancurkan di pangkalan udara Saky, Krimea. Serangan ini disebutkan sebagai serangan terbesar pertama yang dilakukan oleh Ukraina terhadap Rusia. Ukraina juga turut menghancurkan gudang amunisi Rusia di Novooleksiivka, Krimea serta sebuah pos komando yang terletak di area barat daya Kherson (Psaropoulos, 2022). Pada tanggal 16 Agustus, ledakan kembali mengguncang Krimea pasca terbakarnya gudang amunisi Rusia. Ledakan ini kemudian menuai peringatan dari Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB. Kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporizhzhia dinilai dapat menjadi aksi ‘bunuh diri’ akibat kedua negara tersebut (Askew,

2023). Tepat pada 24 Agustus lalu, Ukraina membentuk sebuah perayaan publik sebagai penanda hari kemerdekaan dari kekuasaan Uni Soviet, sekaligus peringatan enam bulan dilakukannya invasi besar oleh Rusia. Perayaan ini dibatalkan karena dinilai berpotensi menimbulkan kelengahan atas serangan Rusia (The Conversation, 2022).

Pada bulan September, Ukraina menunjukkan banyak kemajuan dan mulai mengambil inisiatif dalam perang. Ukraina berhasil melakukan pembebasan wilayah, merebut pusat transportasi Lyman, hingga merebut kendali Rusia. Keberhasilan ini kembali menuai aksi balasan dari Rusia melalui rangkaian serangan udara. Pada bulan Oktober, Rusia kemudian mengumumkan aneksasi terhadap empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Klaim ini kemudian menuai banyak kecaman dari aktor internasional (Aljazeera, 2022b). Pada bulan November, pasukan Rusia mulai mundur dari Kota Kherson dan menjadi salah satu bentuk kemenangan bagi Ukraina. Pada bulan berikutnya, Ukraina kembali memberikan perlawanan melalui serangan pesawat tanpa awak. Pada bulan Desember ini turut menjadi kunjungan pertama Zelenskyy menuju Amerika Serikat sejak dimulainya perang Februari lalu (Fitzgerald dan Davis, 2023). Melalui pertemuan ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan enggan untuk memasok senjata jarak jauh. Hal ini dikhawatirkan akan kembali meningkatkan ‘udara panas’ antara kedua negara. Meski begitu, ia kemudian berjanji memberikan dukungan sistem pertahanan udara Patriot untuk mencegah serangan terhadap infrastruktur Ukraina (Askew, 2023). Tepat di bulan Januari 2023, Ukraina menyerang sebuah bangunan yang menampung pasukan

Rusia di Donetsk. Serangan ini dilaporkan berakhir menewaskan 89 tentara. Di bulan Februari 2023 lalu, pasukan Rusia dilaporkan kembali melancarkan serangan baru di wilayah Ukraina Timur. Tepat setahun terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina, baik Rusia dan Ukraina disebutkan telah mengalami kerugian besar. Dalam kasus ini, korban Rusia dalam perang disebutkan mencapai kisaran 200.000 korban jiwa dan terluka. Di sisi lain, korban dari Ukraina dalam perang mencapai kisaran 100.000 korban tewas dan terluka, serta sedikitnya 30.000 kematian warga sipil (Bigg, 2023).

## **2.2. Perkembangan Media Sosial dalam Hubungan Internasional**

Menyusul perkembangan teknologi dan komunikasi, struktur interaksi dalam kajian Hubungan Internasional juga turut merasakan perluasan signifikan. Dalam implementasinya, dunia internasional kerap memandang perluasan ini sebagai bentuk dunia tanpa batas (*borderless world*) (Dugis, 2016: 10). Tidak hanya melalui definisi batas negara, perubahan juga dirasakan melalui pergeseran fungsi aktor. Kajian Hubungan Internasional sejak awal mengenal lembaga dan badan resmi negara sebagai satu-satunya aktor yang mendominasi. Masuknya globalisasi dalam peradaban manusia kini berhasil melahirkan aktor non-negara baru dalam tatanan internasional (Coulombis & Wolfe, 1986: 373) Agus Subagyo (2019: 4) menyatakan bahwa eksistensi berbagai aktor non-negara dalam kajian Hubungan Internasional memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi transnasional, individu, media dan pers mampu memengaruhi opini sekaligus membangun citra dalam tatanan internasional secara sistematis dan terstruktur.

Eksistensi media dalam Hubungan Internasional lebih dari sekedar pengamat. Luke dan Tuathail (dalam Qarayeva, *et. al.*, 2021) menyebutkan bagaimana media sebagai salah satu aktor non-negara memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat internasional melalui narasi yang dibawa. Media massa yang sejak awal dikenal masyarakat kini mulai beralih kepada media sosial. Media sosial merupakan suatu media komunikasi yang digunakan dalam interaksi sosial untuk mengumpulkan dan berbagi informasi secara cepat dan lengkap (Darmastuti, *et. al.*, 20: 40). Media sosial memiliki berbagai fungsi utama (Kaplan dan Haenlein, 2010: 65), yakni:

1. Memperluas interaksi sosial berbasis internet dan teknologi;
2. Melakukan transisi dari komunikasi yang semula *'from one to many'* menjadi *'from many to many'*; dan
3. Menciptakan media dimana masyarakat tidak hanya mampu menerima dan membagikan informasi, namun juga mengklarifikasi informasi secara *real time*.

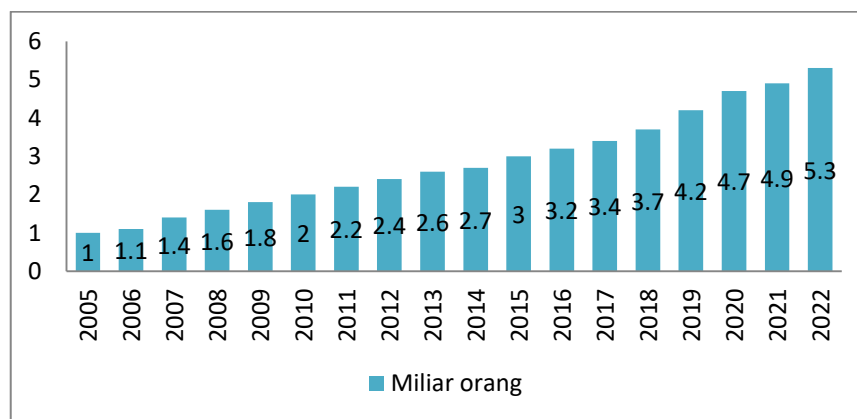
Berbagai aplikasi mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, hingga YouTube disebutkan sebagai sebuah media baru yang menjadi bukti digitalisasi dalam dunia internasional. Seiring berkembangnya peradaban, media sosial muncul sebagai babak baru yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan *real time*. Besarnya pengaruh media sosial ini kemudian kerap digunakan sebagai media mobilisasi, sosialisasi, dan propaganda dalam tatanan internasional. Internet dan teknologi informasi tidak lagi hadir sebagai media pelengkap, namun sebagai suatu 'mesin' yang mampu menciptakan perubahan. Peningkatan penggunaan

teknologi dan media sosial menghasilkan strategi baru untuk menciptakan perubahan radikal melalui peningkatan perhatian publik dalam berbagai isu hangat. Bollier menyebutkan bagaimana media sosial dalam eksistensinya mampu memengaruhi praktik kesetaraan, demokrasi, hingga pembuatan kebijakan (Effendy dalam Subagyo, 2019: 5).

Ditinjau berdasarkan data *International Telecommunication Union (ITU)* atau Persatuan Telekomunikasi Internasional (2022), angka pengguna internet di dunia mencapai kisaran 5,3 miliar per tahun 2022. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,16% dari tahun 2021 yang semula mencapai 4,9 miliar pengguna.

Gambar 2.1

Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Dunia



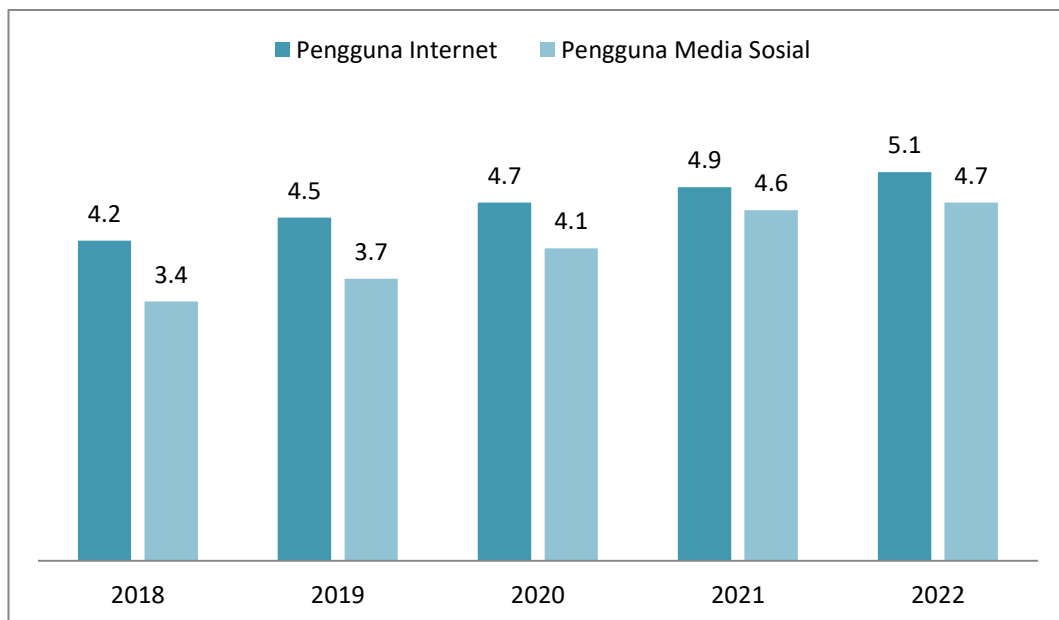
Sumber: *International Telecommunication Union (ITU)* (2022)

Pesatnya perkembangan angka pengguna internet sejatinya berjalan beriringan dengan angka pengguna media sosial. Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* (2022), angka pengguna media sosial per Oktober 2022

mencapai kisaran 4,74 miliar atau setara dengan 59,32% dari total penduduk global. Melalui laporan yang sama disebutkan adanya penambahan lebih dari setengah juta pengguna setiap hari atau setara dengan 6 pengguna baru per detik.

Gambar 2.2

Grafik Pertumbuhan Pengguna Media Sosial di Dunia



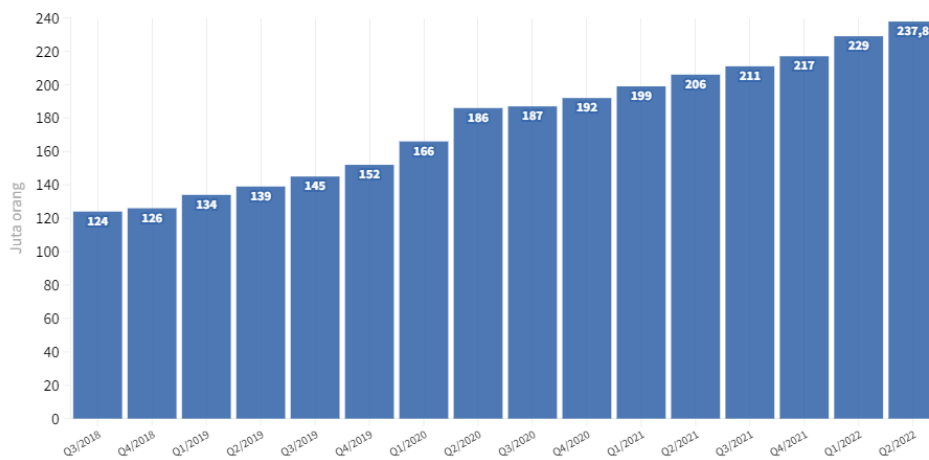
Sumber: *We Are Social dan Hootsuite (2022)*

Salah satu media sosial yang akrab di masyarakat adalah media Twitter. Twitter merupakan jejaring online yang memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk mengirim dan menerima pesan yang dikenal dengan *tweets* (Suzity, 2021: 20). Berdasarkan laporan *We Are Social dan Hootsuite (2022)* per Oktober 2022, Twitter berada pada peringkat ke-14 sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia yang mencapai total 544 juta pengguna aktif. Dilansir melalui laporan yang sama, pengguna aktif harian Twitter yang dapat

dimonetisasi (*monetizable daily active user/MDAU*) mencapai angka 237,8 juta. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan mencapai 16,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya (Rizaty, 2022).

Gambar 2.3

### Grafik Peningkatan Pengguna Twitter di Dunia



Sumber: *We Are Social dan Hootsuite* (2022)

Twitter menawarkan berbagai fitur penting, salah satunya adalah fitur *trending topic*. Fitur ini memberikan daftar berbagai topik hangat yang tengah menjadi bahan perbincangan melalui proses identifikasi kata populer pada pengguna Twitter dalam kurun waktu tertentu. Pengguna Twitter dapat menggunakan fitur tagar atau *hashtag* untuk menuliskan pesan dengan topik tertentu yang sedang hangat. Selain itu, para pengguna juga dapat menggunakan karakter '@' untuk membalas atau merujuk pengguna lain pada pesan yang akan dikirimkan. Kemudahan inilah yang kemudian menjadi modal awal bagi media sosial, terutama Twitter dalam menanamkan kontribusinya dalam digitalisasi Hubungan Internasional (Suzity, 2021: 20-21).

Salah satu bukti besarnya pengaruh media sosial dapat ditinjau melalui konflik Nagorno Karabakh di tahun 2020 lalu. Media sosial dalam konflik Nagorno Karabakh digunakan sebagai alat propaganda, yakni melalui upaya penyebarluasan *awareness*, penyajian kebenaran, sekaligus membentuk opini publik dengan tujuan mendapat dukungan dari khalayak luas (Qarayeva, 2021: 170-173). Secara spesifik, peran Twitter dalam kajian Hubungan Internasional juga dapat ditinjau melalui studi kasus Pemilu Amerika Serikat pada tahun 2017, tepatnya pada aksi propaganda yang dilakukan oleh Donald Trump melalui Twitter sebagai salah satu saluran kampanye politik. Eksistensi *Pepe the Frog* dan berbagai *meme* lain yang digunakan kala itu menjadi suatu bukti bagaimana Trump berhasil meraih popularitas sekaligus menampik berbagai kontroversi dan memengaruhi pemikiran khalayak luas (Praditya, 2021: 14-15).

### **2.3. Perang Informasi Rusia-Ukraina Tahun 2022**

Sehari sebelum dilakukannya invasi, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2022, badan intelijen militer milik Rusia melancarkan serangan siber dalam rangka merusak dan menghapus data sejumlah lembaga dan organisasi fundamental di Ukraina, mulai dari website Pemerintah Ukraina, hingga berbagai jaringan energi, keuangan, dan teknologi informasi dari organisasi. Serangan ini dimaksudkan untuk mendukung serangan militer yang akan diluncurkan setelahnya. Kelumpuhan pada sistem dinilai akan memperlambat koordinasi, layanan, serta pertahanan dari Pemerintah Ukraina. Tepat pada 24 Februari 2022, Rusia kemudian melakukan serangan terhadap satelit Viasat yang ditujukan untuk mematikan komunikasi pada wilayah Ukraina dan Eropa. Serangan-serangan siber



yang diluncurkan Rusia terhadap Ukraina secara teknis dinilai berhasil. Meski begitu, operasi ini nyatanya tidak cukup kuat untuk menghambat operasi intelijen dan kontrol Ukraina, terutama mengingat Ukraina sendiri tidak mengandalkan satelit Viasat sebagai saluran komunikasi utama. Kegagalan ini sayangnya tidak semata dapat dihiraukan. Meski mengalami kegagalan, serangan terhadap sistem digital Ukraina tersebut dinilai sebagai indikasi pertama adanya keterlibatan siber dalam perang antar kedua negara (Shchyhol, 2023).

Selama setahun terakhir, serangan yang dilancarkan Rusia umumnya berfokus pada strategi untuk mengikis kepercayaan masyarakat internasional terhadap Ukraina sebagai mitra yang handal. Serangan Rusia disebutkan sebagai upaya untuk menghalau munculnya simpati dan dukungan kepada Ukraina. Dalam rangka menyukseskan strategi ini, Rusia tidak hanya menargetkan pemerintah maupun masyarakat Ukraina, namun juga seluruh negara yang berpotensi melibatkan diri dalam perang keduanya, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Strategi ini kemudian dijalankan melalui penyebaran narasi melalui penggunaan akun palsu, manipulasi citra melalui *deepfake*, dokumen palsu, hingga penyebaran video dan berita yang disebar dengan identitas palsu. Singkatnya, operasi ini hanya ditujukan untuk menciptakan tanda tanya pada tatanan internasional terhadap kredibilitas pemerintahan Ukraina secara menyeluruh (Bergengruen, 2023).

Sebelum dilakukannya operasi militer, Rusia sejatinya sudah meluncurkan berbagai disinformasi melalui ungkapan perlunya dilakukan pembasmian Nazisme di Ukraina. Meski begitu, propaganda ini tidak bertahan lama kala Rusia

mengklaim ungkapan tersebut ditujukan sebagai reaksi atas berbagai aksi terorisme yang tengah terjadi di Moskow. Pemerintah Moskow kala itu menyebutkan bahwa tuduhan akan dilakukannya serangan ‘bom kotor’ oleh Ukraina merupakan suatu bentuk kekeliruan. Propaganda lain pada awal invasi juga dapat ditinjau melalui keterlibatan Kremlin yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pejuang rakyat. Narasi yang dibawa dalam propaganda kali ini adalah pernyataan bahwa perang yang dilakukan bukanlah sebuah pilihan, melainkan pertarungan untuk menyelamatkan negara. Rusia menyebarkan berbagai isu mengenai ‘bom kotor’<sup>2</sup> yang memicu munculnya narasi tentang adanya kesamaan dengan konflik Osama bin Laden di Washington terdahulu (Barnes, 2022). Isu ‘bom kotor’ ini kemudian disanggah oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Narasi tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk tuduhan palsu yang diluncurkan Rusia sebagai dalih untuk menciptakan perang.

Narasi disinformasi dan propaganda dari Rusia juga muncul melalui tuduhan bahwa Ukraina merupakan nazi yang tengah merencanakan genosida kepada masyarakat penutur Bahasa Rusia di wilayah Timur (Barnes, 2022). Sebagaimana motivasi yang digemborkan Rusia sejak awal untuk melakukan demiliterisasi dan denazifikasi pada Pemerintah Ukraina, Rusia menyatakan bahwa konflik di Donetsk dan Luhansk—secara kolektif dikenal sebagai Donbas—yang menewaskan hampir 14.000 orang, termasuk tentara, masyarakat sipil, juga pemberontak sebagai aksi genosida. Sejak tahun 2014, angka korban

---

<sup>2</sup> ‘Bom kotor’ merupakan sebuah bom yang mengandung bahan radioaktif halus (seperti uranium) yang dapat menyebar di udara saat meledak. Apabila terjadi ledakan, ‘bom kotor’ dapat menghasilkan kontaminasi lokal. Efek yang dihasilkan dari ‘bom kotor’ bergantung pada kondisi atmosfer, orang yang menghirup atau menelan debu radioaktif tersebut dapat terluka atau terbunuh.

pelanggaran hak asasi manusia di Donbas masih terus dicatat. Meski begitu, hingga saat ini belum terdapat bukti kredibel bahwa aksi genosida terjadi di Donbas dengan Ukraina sebagai pelaku utama. Sejak pertama kali mengajukan dialog terkait isu genosida ini, Rusia nyatanya belum mampu mengajukan klaim dan bukti ke PBB. Narasi genosida ini secara sekilas terdengar masuk akal, namun ketiadaan bukti dari Rusia yang akhirnya menimbulkan tanda tanya besar. Alexander Hinton selaku direktur *the Center for the Study of Genocide and Human Rights* di Rutgers University, mengklaim bahwa keengganan Rusia untuk menyerahkan bukti menunjukkan bahwa prioritas utamanya bukanlah menyelamatkan nyawa, melainkan melancarkan tuduhan untuk menutupi invasi yang dilakukan (Aljazeera, 2022c).

Para pejabat Amerika Serikat juga mengungkapkan bagaimana Rusia melontarkan tuduhan bahwa Ukraina merencanakan serangan kimia jauh sebelum invasi berlangsung (Barnes, 2022). Kementerian Pertahanan Rusia memberikan tuduhan bahwa Ukraina meracuni beberapa tentara yang tengah menguasai wilayah tenggara Zaporizhzhia. Sejumlah tentara yang dilaporkan keracunan parah pada akhir Juli tersebut teridentifikasi akibat zat beracun, yakni toksin botulinum tipe B<sup>3</sup>. Kementerian Pertahanan Rusia tidak mengklarifikasi apakah keracunan tersebut memang berasal dari daging kaleng kadaluwarsa, tempat ditemukannya toksin botulinum (Aljazeera, 2022d). Dari sisi Ukraina, pasukan angkatan bersenjata mengklaim bahwa mereka tidak pernah menggunakan senjata kimia dan tetap mematuhi hukum perang. Sejak awal dilakukannya invasi, Rusia

---

<sup>3</sup> Toksin botulinum tipe B merupakan racun saraf yang dapat menyebabkan botulisme apabila tertelan dalam produk makanan yang telah terkontaminasi. Meski begitu, toksin botulinum tipe B juga umum digunakan secara medis.

berulang kali memberikan seruan bahwa Ukraina dimungkinkan akan menggunakan senjata non-konvensional seperti senjata biologis maupun ‘bom kotor’. Nyatanya, hingga hari ini berbagai tuduhan tersebut belum terbukti kebenarannya. Maka dari itu, baik Ukraina dan sekutu Baratnya kemudian memandang tuduhan tersebut sebagai serangan ‘bendera palsu’ yang digunakan Rusia untuk menjatuhkan Ukraina (Reuters, 2023).

Serangan Rusia kemudian juga dilakukan melalui penciptaan akun dan persona fiksi dalam media. Perusahaan induk Facebook, Meta, menyatakan telah menghapus serangkaian akun palsu yang berbasis di China dan Rusia. Akun-akun ini disebutkan melakukan tiruan terhadap situs berita resmi, seperti The Guardian, ANSA, dan Der Spiegel untuk memberikan kritik kepada negara-negara Eropa yang menunjukkan dukungan kepada Ukraina selama perang. Melalui laporan Meta, disebutkan adanya lebih dari 2.000 akun dan halaman Facebook yang menyebarkan narasi pro-Kremlin. Meta menyatakan bahwa akun-akun palsu tersebut mengunggah artikel asli yang mengkritik pemerintah dan pengungsi Ukraina, serta menunjukkan dukungan terhadap Rusia. Meta melaporkan bahwa setelah domain operasi tersebut diblokir, para pengguna akun masih terus mencoba membuat situs web baru (Euronews, 2022).

Tepat tiga minggu setelah serangan pertama Rusia, Ukraina kembali digemparkan oleh sebuah video dalam situs berita. Dalam video tersebut, terlihat Presiden Volodymyr Zelenskyy yang tengah memohon untuk diberhentikan operasi militer tersebut. Dalam video ini pula disebutkan bahwa Zelenskyy memberikan pengumuman penyerahan diri dan akan meninggalkan Ukraina

(Bergengruen, 2023). Andriy Taranov, anggota dewan Perusahaan Penyiaran Publik Ukraina bernama '*Suspilne Ukraine*', menyebutkan bahwa video tersebut sangat kontradiktif mengingat tidak adanya diskusi dan obrolan terkait penyerahan diri pasca terjadinya invasi Rusia. Taranov kemudian menyebutkan bahwa pesan dan video tersebut palsu. Ia mengklaim bahwa akun media sosial dan sistem penyiaran di Ukraina telah berulang kali mendapat percobaan peretasan sejak serangan Rusia pada akhir Februari lalu. Aksi peretasan ini ditujukan untuk menyebarkan pesan palsu bahwa Ukraina menyerah atau menyebarkan dokumen dan narasi yang mendukung operasi militer dari Rusia.

Meski begitu, para ahli menyebutkan penyebaran video ini sejatinya tidak menghasilkan dampak signifikan. Hal ini dikarenakan sejak awal video ini tidak dimungkinkan untuk menghasilkan 'kerusakan', melainkan untuk menciptakan ketidakpastian, ketidakpercayaan, dan kebingungan pada masyarakat secara perlahan (Conger, 2022). Tersebarnya video yang sempat menggemparkan ini kemudian menuai respon dari Presiden Zelenskyy. Respon ini ditunjukkan melalui sebuah video tanggapan yang menyangkal klaim tersebut. Zelenskyy mengunggah sebuah video pendek yang menunjukkan bahwa ia tengah berada di Kyiv, Ibukota Ukraina dan menyatakan bahwa Pemerintah Ukraina akan mempertahankan tanah, anak-anak, dan keluarga di dalamnya. Ia mengklaim bahwa Pemerintah Ukraina tidak berencana untuk berhenti berjuang hingga mencapai kemenangan (Al-Saied, 2023).

Secara keseluruhan, serangan informasi Rusia umumnya menggunakan strategi 'bendera palsu' untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat internasional

terhadap Ukraina. Hal ini dapat ditinjau melalui bagaimana Rusia berulang kali menuduh Kyiv, Ibukota Ukraina, telah merencanakan operasi ‘bendera palsu’ dengan senjata non-konvensional berbasis bahan biologis dan radioaktif. Operasi ‘bendera palsu’ merupakan suatu istilah yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menyalahkan pihak lain (Turns, 2023). Hal ini dapat ditinjau melalui beredarnya sebuah video di saluran Telegram yang menunjukkan adanya bentrokan antara pasukan pro-Rusia dan pro-Ukraina. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa kelompok pro-Ukraina mencoba meledakkan tangki klorin di daerah Donbas yang saat itu tengah dikuasai oleh Rusia dan kelompok separatis. Video ini kemudian dikonfirmasi telah melewati serangkaian proses manipulasi dan diambil jauh sebelum terjadinya invasi. Manipulasi lain dapat ditinjau melalui klaim pasukan militer Rusia yang melaporkan telah membunuh lima anggota kelompok pro-Rusia dan menghancurkan dua kendaraan perang. Klaim ini kemudian dibantah oleh seorang analis riset di lembaga *think tank* RUSI bahwa tidak ada bukti kuat bahwa kendaraan dalam video memang milik Ukraina. Ia menyebutkan bahwa kendaraan dalam video terlihat persis seperti kendaraan perang BTR-70M versi Rusia yang telah diproduksi sejak 2006 lalu (Devlin, *et. al.*, 2022).

Gambar 2.4

Tampak Belakang Kendaraan BR-70M yang Terbakar dalam Siaran TV Rusia



Sumber: Devlin, *et. al.*, 2022

Berbagai disinformasi yang terus beredar dari satu media ke media lainnya tidak hanya kian meningkatkan rasa takut dan kekhawatiran dalam masyarakat, namun juga memecah belah opini publik dalam menilai realitas yang terjadi di dunia nyata. Bersama dengan bingkai negatif ini, Rusia memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan ketegangan tanpa menimbulkan amarah dan merusak dukungan masyarakat internasional terhadap Putin dan Rusia (Barnes, 2022).